

## ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara historis pernah mengalami masa penjajahan yang cukup panjang, dengan demikian merupakan suatu keharusan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengisi dan menjaga konstitusional sebagai upaya dalam rangka menciptakan bangsa yang berlandaskan atas norma-norma, nilai-nilai dan juga kaidah- kaidah yang berlandaskan berbagai aspek hukum yang ada didalamnya guna menciptakan pembaruan hukumnya secara menyeluruh. Masalah yang diangkat adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam (studi putusan nomor:183/Pid.Sus/2025/Pn.Jmb), Apakah putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam sudah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*). Pertimbangan majelis hakim berdasarkan unsur-unsur dalam pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Tunggal pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan dakwaan 7 tahun penjara. maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 4 ( empat ) bulan penjara. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan tindak pidana yang di anggap sangat meresahkan masyarakat. Maka dakwaan jaksa yaitu 7 tahun penjara dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Saran yang dikemukakan hendaknya terdakwa yang melakukan penyalahgunaan senjata tajam vonis lebih berat lagi untuk memberikan efek jera kepada terdakwa.

**Kata Kunci : Tinjauan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis, Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam**

## **ABSTRACT**

*The Unitary State of the Republic of Indonesia has historically experienced a long period of colonialism, thus it is a necessity for all Indonesian people to fill and maintain the constitution as an effort to create a nation that is based on norms, values and also rules that are based on various legal aspects in it in order to create comprehensive legal reform. The problem raised is what is the basis for the judge's considerations in handing down a sentence to a perpetrator of sharp weapon abuse (study of decision number: 183/Pid.Sus/2025/Pn.Jmb), does the decision handed down to the perpetrator of sharp weapon abuse reflect a sense of justice in society. This research is descriptive analytical. In writing this thesis, the author uses a normative legal approach. One of the data sources used by the author as the research object is a secondary document (Jambi District Court Decision). The panel of judges' considerations based on the elements in Article 2 of Emergency Law Number 12 of 1951 have been legally and convincingly proven that the defendant has committed a crime as charged by the public prosecutor in the Single Indictment of Article 2 paragraph (2) of Emergency Law Number 12 of 1951 with a sentence of 7 years in prison. Therefore, the defendant must be found guilty and the defendant must be given a sentence commensurate with his actions, the threat of which according to Article 2 of Emergency Law Number 12 of 1951 is a maximum sentence of 10 (ten) years in prison. However, in this case, the defendant was sentenced to 1 (one) year and 4 (four) months in prison. The sentence handed down was still too light considering the defendant had committed a crime deemed to be highly disturbing to the public. Therefore, the prosecutor's demand of 7 years in prison and the judge's sentence of only 1 year and 4 months in prison were deemed not to reflect a sense of justice in society. The suggestion put forward is that defendants who misuse sharp weapons should be given a heavier sentence to provide a deterrent effect on the defendant.*

**Keywords: Review of Judge's Decision in Sentencing Perpetrators of Sharp Weapon Abuse**